

Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Terhadap Kinerja Perekonomian Kalimantan Barat: Analisis Simulasi dengan Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi

Eddy Suratman^{*}

Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura

ABSTRAK

Pemerintah daerah Kalimantan Barat telah membuat rencana kebijakan untuk membangun wilayah perbatasan. Rencana tersebut terfokus pada tiga hal: (1) kapasitas pembangunan wilayah perbatasan; (2) pembangunan ekonomi perbatasan; dan (3) pembangunan sosial budaya wilayah perbatasan. Studi ini bermaksud menganalisa dampak dari kebijakan pembangunan wilayah perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan didasarkan atas hasil simulasi kebijakan yang menggunakan matriks Sistem Neraca Sosial Ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2000. Sebagai perbandingan, studi ini juga bermaksud menganalisa kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan skenario tanpa intervensi kebijakan di wilayah perbatasan. Temuan simulasi kebijakan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan dari wilayah perbatasan dapat meningkatkan kinerja perekonomian dari Kalimantan Barat. Dengan menerapkan kebijakan ekonomi wilayah perbatasan akan memberi dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, pendapatan rumah tangga dan pendapatan dari sektor produksi.

Kata Kunci: kebijakan pembangunan wilayah perbatasan, matriks neraca sosial ekonomi, kinerja perekonomian

Klasifikasi JEL: R15, R58

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Kalimantan Barat adalah salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang secara langsung mempunyai perbatasan darat dengan negara tetangga yaitu Serawak di Malaysia. Kawasan perbatasan ini memiliki potensi yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Selain memang adanya keterbatasan baik fisik maupun sosial ekonomi di kawasan ini, juga dikarenakan selama ini kurangnya perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya antara lain adalah munculnya banyak permasalahan di kawasan ini, seperti kesenjangan ekonomi, keteringgalan pembangunan, dan keterisolasian kawasan.

Untuk mengatasi hal itu, maka pemerintah provinsi Kalimantan Barat menyusun kebijakan untuk mengembangkan kawasan perbatasan. Rencana kegiatan pengembangan kawasan

^{*} Lektor pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak.

perbatasan tersebut fokus pada tiga hal yaitu: (1) pengembangan kapasitas kawasan perbatasan, (2) pembangunan perekonomian perbatasan, dan (3) pembangunan sosial budaya perbatasan. Kebijakan ini penting karena 5 dari 10 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat memiliki wilayah administrasi kawasan perbatasan¹. Sehingga diperkirakan dampak ekonomi baik yang bersifat langsung maupun *multiplier* dari kebijakan tersebut akan dirasakan di seluruh wilayah provinsi ini.

Tulisan ini akan menganalisis dampak dari kebijakan pengembangan kawasan perbatasan tersebut terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat, berdasarkan hasil simulasi kebijakan dengan menggunakan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Kalimantan Barat Tahun 2000². Sebagai pembandingan, juga akan ditunjukkan bagaimana kinerja perekonomian Kalimantan Barat tanpa kebijakan pengembangan kawasan perbatasan.

II. GAMBARAN UMUM KAWASAN PERBATASAN

II.1. Letak dan Potensi Kawasan

Secara geografis kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak berada pada bagian paling utara wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang membentang dari barat ke timur sepanjang sekitar 800 km yang meliputi kabupaten Sambas sampai kabupaten Kapuas Hulu. Kondisi wilayah perbatasan digambarkan secara topografis relatif bergelombang dan merupakan hulu dari banyak sungai di Kalimantan Barat maupun Serawak. Jenis tanah sebagian besar berupa podsolik merah kuning dan sangat peka erosi.

Potensi sumber daya alam sementara ini yang terdeteksi adalah :

- Tambang : Batubara terdapat di Senaning kabupaten Sintang dan Emas (tanah aluvial-sungai) tersebar hampir di seluruh aliran sungai di sepanjang kawasan perbatasan.
- Hutan : potensinya cukup besar dan dapat diusahakan seluas 80.000 Ha. Selain itu di kawasan ini terdapat hutan lindung berupa taman nasional (TN) Gunung Niut, TN Danau Sentarum, dan TN bentuang karimun. TN-TN ini berpotensi dikembangkan sebagai obyek wisata alam.
- Perkebunan berupa : coklat, lada, karet, kelapa sawit dan lain-lain yang sebagian besar hasilnya dijual ke Serawak.
- Potensi perikanan air tawar cukup besar dan memiliki spesies ikan yang relatif lengkap dan hanya terdapat di beberapa negara di dunia.

II.2. Wilayah Administrasi

Secara administrasi, kawasan perbatasan meliputi 4 kabupaten, yaitu kabupaten Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, namun sejak akhir 2000 menjadi 5 kabupaten karena kabupaten Sambas dimekarkan menjadi dua, yaitu kabupaten Sambas dan kabupaten Bengkayang.

Jika diasumsikan kawasan perbatasan merupakan kawasan yang berjarak 20 km dari garis batas sepanjang 800 km, terhitung dari tanjung Dato, kabupaten Sambas yang berada

¹ Pada tahun 2004 jumlah Kabupaten/Kota bertambah menjadi 12 setelah lahirnya Kabupaten Melawi yang dimekarkan dari Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau yang dimekarkan dari Kabupaten Sanggau.

² Penulis membangun SNSE tersebut mengikuti cara (metodologi) yang dilakukan oleh Keuning dan Ruijter (1988) ketika membangun SNSE Indonesia (1982) dan SNSE Sri Lanka (1986), serta Resosudarmo dan kawan-kawan (1999) ketika membangun SNSE DKI Jakarta.

diujung paling barat sampai ke kabupaten Kapuas Hulu yang berada diujung paling timur, maka luas kawasan perbatasan meliputi 1.600 Km², atau 1.600.000 Ha.

II.3. Kependudukan

Jumlah penduduk kawasan perbatasan tahun 1999 sebanyak 152.720 orang dengan kepadatan penduduk rata-rata 9 orang per Km². Sebagian besar penduduknya bersuku Dayak. Secara sosiologis, suku dayak perbatasan memiliki keterikatan sangat tinggi dengan suku dayak yang berada di perbatasan Negara Bagian Serawak (Malaysia).

II.4. Perekonomian

Data yang *up to date* dari kabupaten-kabupaten dan kecamatan-kecamatan diperbatasan belum ada. Secara makro, ekonomi perbatasan didominasi sektor pertanian (menyumbang sekitar 37%-57% PDRB kabupaten), khususnya tanaman pangan dan perkebunan rakyat. Kabupaten Sambas relatif maju dalam sub sektor tanaman pangan, perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. Kabupaten Sanggau relatif maju dalam sub sektor perkebunan rakyat besar dan tanaman pangan. Sementara Kabupaten Sintang relatif maju dalam sub sektor kehutanan, perikanan, dan tanaman pangan.

II.5. Tingkat Kesejahteraan

Meskipun kawasan perbatasan kaya dengan sumberdaya alam dan letaknya mempunyai akses ke pasar (serawak), tapi terdapat sekitar 45% desa miskin dengan jumlah penduduk miskin sekitar 35%.

II.6. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana transportasi yang tersedia dapat melalui laut, sungai dan darat. Fasilitas transportasi laut menghubungkan Paloh (kabupaten Sambas) dengan Lundu (Serawak), untuk fasilitas sungai masih ada namun sudah tidak populer lagi. Jaringan jalan darat di Kalimantan Barat berbentuk vertikal sehingga pelayanannya kurang efektif. Panjang jalan darat sekitar 520 km dengan rincian : 200 km jalan tanah, 30 km jalan batu, 290 km jalan aspal. Sedangkan menurut fungsinya terdapat 63% jalan kabupaten, 31% jalan provinsi, dan 6% jalan nasional.

Untuk fasilitas kelistrikan, dari 14 ibu kota kecamatan yang ada di kawasan perbatasan Kalimantan Barat, baru 6 ibukota kecamatan (43%) yang mendapat pelayanan. Hal ini menunjukkan besarnya perbedaan kesejahteraan masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat dengan masyarakat perbatasan di Serawak yang hampir seluruhnya telah mendapatkan pelayanan listrik. Pada saat ini di kawasan perbatasan Serawak telah tersedia pembangkit listrik tenaga air, seperti dari bendungan Batang Ai di Lubuk Antu dengan kapasitas 108 MW dan bendungan Bakun yang sedang dibangun dengan kapasitas 2.400 MW.

Kondisi tersebut ternyata terjadi pula pada fasilitas air bersih yang hanya mampu melayani 50 persen penduduk di kawasan Kalimantan Barat. Sedangkan penduduk kawasan perbatasan di Serawak telah terpenuhi 100 persen fasilitas air bersih.

III. TINJAUAN PUSTAKA: SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI dan EKONOMI PERBATASAN

III.1. Kerangka Dasar Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)

SNSE merupakan sebuah matriks yang merangkum neraca sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Kumpulan-kumpulan neraca (*account*) tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni kelompok neraca-neraca endogen dan kelompok neraca-neraca eksogen. Secara garis besar kelompok neraca-neraca endogen dibagi dalam tiga blok: blok neraca-neraca faktor produksi, blok neraca-neraca institusi dan blok neraca-neraca aktivitas (kegiatan) produksi. Untuk menyingkat penulisan, ketiga blok tersebut selanjutnya akan disebut sebagai blok faktor produksi, blok institusi dan blok kegiatan produksi.

Setiap neraca dalam SNSE disusun dalam bentuk baris dan kolom. Vektor baris menunjukkan perincian penerimaan, sedangkan vektor kolom menunjukkan perincian pengeluaran. Untuk kegiatan yang sama, jumlah baris sama dengan jumlah kolom, dengan kata lain jumlah penerimaan sama dengan pengeluaran. Susunan SNSE secara sederhana dapat dilihat pada Tabel 1. Untuk setiap baris, kolom 5 merupakan penjumlahan dari kolom 1,2,3 dan 4. Demikian pula untuk setiap kolom, baris 5 merupakan penjumlahan dari baris 1,2,3 dan 4. Karena jumlah penerimaan sama dengan pengeluaran, maka baris 5 merupakan *transpose* dari kolom 5.

Di dalam tabel SNSE di atas terdapat beberapa matriks. Matriks T merupakan matriks transaksi antar blok dalam neraca endogen. Matriks X menunjukkan pendapatan neraca endogen dari neraca eksogen. Matriks L menunjukkan pengeluaran neraca endogen untuk neraca eksogen, disebut juga *leakages*. Matriks Y merupakan pendapatan total dari neraca endogen. Sedangkan matriks Y' merupakan pengeluaran total dari neraca endogen.

Dari tabel SNSE tersebut, distribusi pendapatan neraca endogen dapat dirinci menjadi:

$$\text{Jumlah pendapatan faktor produksi} = Y_1 = T_{1,3} + X_1 \quad (1)$$

$$\text{Jumlah pendapatan institusi} = Y_2 = T_{2,1} + T_{2,2} + X_2 \quad (2)$$

$$\text{Jumlah pendapatan kegiatan produksi} = Y_3 = T_{3,2} + T_{3,3} + X_3 \quad (3)$$

Sedangkan distribusi pengeluaran neraca endogen dapat dirinci menjadi:

$$\text{Jumlah pengeluaran faktor produksi} = Y'_1 = T_{2,1} + L_1 \quad (4)$$

$$\text{Jumlah pengeluaran institusi} = Y'_2 = T_{2,2} + T_{3,2} + L_2 \quad (5)$$

$$\text{Jumlah pengeluaran kegiatan produksi} = Y'_3 = T_{1,3} + T_{3,3} + L_3 \quad (6)$$

Matriks T sebagai matriks transaksi antar blok di dalam neraca endogen dapat ditulis sebagai berikut:

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{1,3} \\ T_{2,1} & T_{2,2} & 0 \\ 0 & T_{3,2} & T_{3,3} \end{bmatrix} \quad (7)$$

Tabel 1. Kerangka Dasar SNSE

				Pengeluaran				
				Neraca Endogen			Neraca Eksogen	Total
				Faktor Produksi	Institusi	Kegiatan Produksi		
				1	2	3	4	5
P e n e r a c a E n d o g e n	Faktor Produksi	1	0	0	T ₁₃ Distribusi Nilai Tambah	X ₁ Pendapatan Eksogen Fakt. Prod.	Y ₁ Jumlah Pendapatan Fakt. Prod.	
	Institusi	2	T ₂₁ Pendapatan Institusi dari Faktor Produksi	T ₂₂ Transfer Antar Institusi	0	X ₂ Pendapatan Institusi Dari Eksogen	Y ₂ Jumlah Pendapatan Institusi	
	Kegiatan Produksi	3	0	T ₃₂ Permintaan Akhir Domestik	T ₃₃ Transaksi Antar Keg. (I-O)	X ₃ Ekspor Dan Investasi	Y ₃ Jumlah Output Kegiatan Produksi	
	Neraca Eksogen	4	L ₁ Peng. Ekso. Fakt. Prod.	L ₂ Tabungan	L ₃ Impor & pjg Tak langsung	R Trans. Antar Eksogen	Juml. Pend. Eksogen	
	Jumlah	5	Y ₁ ' Juml. Pengl. Fakt. Prod.	Y ₂ ' Juml. Pengl. Institusi	Y ₃ ' Juml. Pengl. Keg. Prod.	Juml. Pengl. Eksogen		

Sumber: Thorbecke, 1988 : 210, dimodifikasi

Sebagai salah satu submatriks dari SNSE, matriks T juga menggambarkan transaksi penerimaan dan pengeluaran, dengan lingkup yang lebih sempit, yakni di dalam neraca endogen.

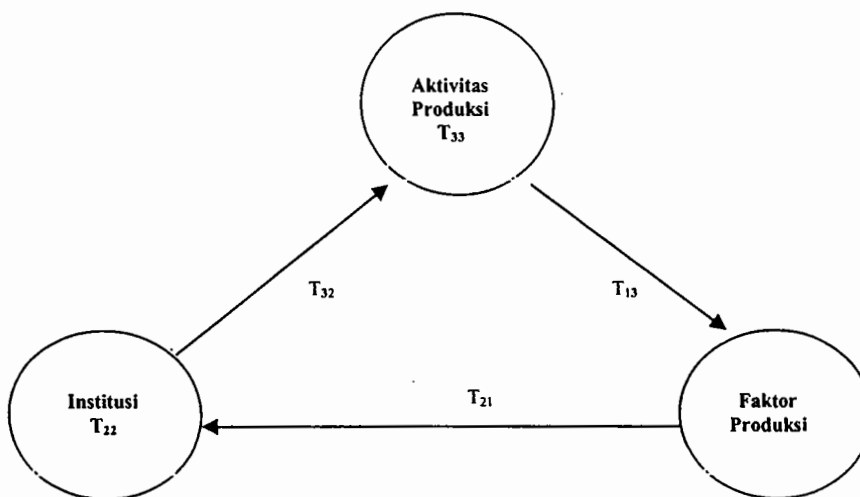
Apabila dibaca per baris, matriks T menunjukkan penerimaan salah satu blok dari blok yang lain. Pada baris satu, $T_{1,3}$ menunjukkan penerimaan faktor produksi dari kegiatan produksi. Pada baris dua, $T_{2,1}$ menunjukkan penerimaan institusi dari faktor produksi dan $T_{2,2}$ menunjukkan penerimaan institusi dari institusi itu sendiri. Pada baris tiga, $T_{3,2}$ menunjukkan penerimaan kegiatan produksi dari institusi dan $T_{3,3}$ menunjukkan penerimaan kegiatan produksi dari kegiatan produksi itu sendiri.

Sedangkan jika dibaca per kolom, matriks T menunjukkan pengeluaran salah satu blok untuk blok yang lain. Pada kolom satu, $T_{2,1}$ menunjukkan pengeluaran faktor produksi untuk institusi. Pada kolom dua, $T_{2,2}$ menunjukkan pengeluaran institusi untuk institusi itu

sendiri dan $T_{3,2}$ menunjukkan pengeluaran institusi untuk kegiatan produksi. Pada kolom tiga, $T_{1,3}$ menunjukkan pengeluaran kegiatan produksi untuk faktor produksi dan $T_{3,3}$ menunjukkan pengeluaran kegiatan produksi untuk kegiatan produksi itu sendiri.

Ditinjau dari sama tidaknya blok yang bertransaksi, maka di dalam matriks transaksi T diatas terdapat transaksi yang terjadi antar blok yang berbeda seperti $T_{1,3}, T_{2,1}, T_{3,2}$ dan yang terjadi di dalam blok yang sama seperti $T_{2,2}$ dan $T_{3,3}$. Hubungan tersebut bisa dilihat pada Gambar 1. Tanda panah dalam Gambar 1 menunjukkan aliran uang.

Gambar 1. Transaksi Antar Blok dalam SNSE



Sumber: Thorbecke (1988)

Ekonomi Perbatasan

Sebagai cabang baru dari ekonomi regional, ekonomi perbatasan menggabungkan antara ekonomi geografi dan ilmu ekonomi untuk mempelajari proses pembangunan di kawasan perbatasan yang terdiri paling tidak dua daerah dengan sistem politik dan kebijakan ekonomi yang berbeda. Terdapat beberapa alasan mengapa studi tentang ekonomi perbatasan menjadi relatif penting, yaitu antara lain:

1. Suatu kenyataan bahwa kebanyakan kawasan perbatasan terletak jauh dari pusat aktivitas ekonomi sehingga timbul kecenderungan menjadi kawasan yang tertinggal.
2. Adanya hambatan administrasi dalam lalu lintas antar barang dan orang sehingga kawasan perbatasan yang pada dasarnya homogen menjadi heterogen.
3. Berkaitan dengan *trend* globalisasi saat ini yang mendorong perekonomian menjadi tanpa batas.

Meskipun dasar teori dan metodologi merupakan faktor penting dalam menganalisa ekonomi perbatasan, tetapi interpretasi harus dilakukan secara sistematis dengan melibatkan lingkungan, struktur sosial dan politik. Terdapat tiga aspek penting yang harus

diperhatikan dalam menganalisa ekonomi perbatasan yaitu; *pertama*, asumsi bahwa kawasan perbatasan heterogen dan arus barang dan orang menjadi tidak mudah, sehingga ekonomi perbatasan harus bisa mengidentifikasi pembagian secara ruang faktor produksi serta adanya kemungkinan *cross border trade* dan kerjasama ekonomi; *kedua*, pembuat kebijakan tidak harus merubah struktur politik dan ekonomi kawasan perbatasan, melainkan berupaya untuk membuat alokasi yang rasional dari faktor produksi, memaksimalkan output ekonomi di kawasan perbatasan dan mempelajari pembentukan kerjasama antar perbatasan dan integrasi ekonomi, sehingga kawasan perbatasan berubah dari *political region* menjadi *economic region*; dan *ketiga*, strategi kebijakan dalam mengembangkan kawasan perbatasan harus memperhatikan *overall* dan *local perspective* karena tiap sisi kawasan punya kelebihan masing-masing, sehingga perlu dipadukan antara preferensi nasional dan karakteristik kawasan perbatasan, antara kawasan perbatasan dan sub region-nya, dan antara sub region lain di bawah *political region*.

Menurut Guo³, ada Beberapa dasar teori yang harus diperhatikan dalam menganalisis ekonomi perbatasan yaitu:

1. Teori Pusat-Pinggiran (*Core periphery theory*)

Teori ini menganggap bahwa pada suatu perbatasan akan terdapat dua daerah yaitu daerah pinggiran yang berbasis sumber daya alam (*primer*) dan daerah pusat yang merupakan penghasil barang dan jasa modern (*sekunder/tersier*). Daerah pinggiran mempunyai keunggulan komparatif sumber daya alam terhadap daerah pusat, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian apabila wilayah *Core* dikembangkan, maka wilayah *Periphery* juga akan turut berkembang sehingga dalam jangka panjang *Core-Periphery* akan habis. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perluasan pasar, penemuan sumber baru, perbaikan sarana transportasi dan kebijakan daerah yang sesuai. Namun apabila jarak *core-periphery* terlalu jauh, maka dampak dari pengembangan *core* terhadap *periphery* tidak ada. D.W Hughes dan D.W Holland (1994) menunjukkan bahwa daerah pinggiran akan mendapatkan pengaruh positif dari *spread effect* dan pengaruh negatif dari *backwash efek*. *Spread effect* tersebut meliputi investasi, inovasi dan pertumbuhan dari daerah pusat ke daerah pinggiran. Sedangkan *backwash efek* adalah pengaruh yang tidak kondusif dari wilayah pusat ke wilayah pinggiran.

2. Skala Ekonomi Spasial (*Economics of spatial scale*)

Sejumlah fakta menunjukkan, bahwa dengan dibukanya perbatasan ekonomi di antara beberapa negara (khususnya negara kecil) akan menciptakan peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh meningkatnya skala ekonomi. Proses ini terjadi melalui adanya peningkatan produktivitas akibat tingginya pemanfaatan sumber daya alam, penelitian, pembangunan, jaringan komunikasi, fasilitas, transportasi dan manfaat lainnya. Secara teoritis, memproduksi dalam skala daerah yang lebih besar akan meningkatkan produktivitas karena adanya aglomerasi ekonomi (dapat diperoleh *ekstra return* dengan memanfaatkan kerja sama). Terbukanya perbatasan dapat berimplikasi pada berubahnya konsep ekonomi perbatasan menjadi "ekonomi tanpa batas". Hasil studi Cecchini (1988) menunjukkan bahwa GDP negara-negara Eropa meningkat sebesar 4% akibat dibukanya perbatasan. Peningkatan tersebut terdiri dari 1,5% dari *free trade* dalam jasa keuangan, 0,5% dari pemindahan kontrol pintu masuk dan 2% dari meningkatnya kompetisi, skala ekonomi dan bertambahnya penawaran.

³ Lihat Rongxing Guo dalam Border-Regional Economics, (1996) Physica-Verlag, Heidelberg, Germany hal 47

Studi yang dilakukan Evans (2000) menemukan bahwa ketatnya perbatasan negara akan mengurangi aliran perdagangan, merugikan kesejahteraan, dan memperbanyak aturan kebijakan.⁴ Dalam studi itu Evans menggunakan dua pertanyaan penelitian yaitu; *pertama*, apakah dampak perbatasan akan membesar karena tingginya tekanan harga produk domestik dan produk luar negeri, atau karena harga impor dan domestik sangat *close substitutes*; dan *kedua*, Jika selisih harga cukup penting, apakah hal ini merefleksikan terdistorsinya hambatan perdagangan atau apakah hal ini muncul dari faktor yang tidak terdistorsi, sebagaimana perbedaan dalam biaya transaksi atau karakteristik produk.

Untuk menjawab pertanyaan pertama ia menunjukkan bahwa efek perbatasan pada kenyataannya lebih rendah pada produk yang kurang elastis. Hal ini mendukung bahwa tingkat (kemampuan) substitusi antara produk dalam dan luar negeri adalah alasan utama kenapa muncul perbatasan (pembatasan). Meskipun dengan asumsi elastisitas substitusi yang dapat diterima, hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan (jarak) harga antara barang impor dan barang domestik jauh lebih besar dari tarif yang ditetapkan.

Sedangkan pada pertanyaan kedua Evans menemukan bahwa barang yang mempunyai biaya informasi lebih tinggi tidak mempunyai pengaruh pembatasan lebih besar, yang berarti biaya informasi bukan penyebab utama dari dampak perbatasan terhadap volume perdagangan.

Temuan ini mendukung preposisi bahwa adanya distorsi perbatasan, pemerintah dan kebijakan memainkan peranan penting dalam meningkatkan dampak perbatasan. Pembatasan wilayah perbatasan akan berimplikasi pada besarnya potensi hambatan perdagangan, biaya, kesejahteraan dan aturan kebijakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pada kasus AS-Canada dan OECD, perubahan kesejahteraan di wilayah perbatasan dipengaruhi oleh kebijakan perbatasan antar negara⁵. Secara keseluruhan Evans dapat menunjukkan signifikansi perbatasan pada perekonomian.

Sementara itu, Hanson dan Spilimbergo (1999) menguji korelasi antara *sectoral shock* dan peraturan perbatasan di AS. Peraturan perbatasan merupakan perangkat kebijakan utama pemerintah AS untuk mencegah imigrasi ilegal. Tujuan studi ini untuk melihat apakah peraturan perbatasan akan berkurang seiring positifnya *shock* pada sektor-sektor yang secara intensif menggunakan tenaga kerja ilegal. Hal ini diperlukan sebagai bahan dalam menentukan sikap bagaimana seharusnya kebijakan perbatasan tersebut diberlakukan.

Temuan utama studi ini menunjukkan bahwa peraturan perbatasan berkorelasi secara negatif dengan perubahan harga relatif produk pakaian, buah-buahan, sayur-sayuran dan industri pemotongan hewan di AS bagian barat. Hasil ini mendukung diperlukannya aturan perbatasan yang lebih longgar ketika permintaan terhadap tenaga kerja ilegal meningkat pada industri di wilayah tersebut. Studi ini juga menunjukkan meningkatnya aturan perbatasan ketika kondisi semua pasar kerja di AS diperketat, yang berarti mendukung langkah untuk meningkatkan peraturan ketika ekspektasi imigrasi ilegal meningkat.

Bersamaan dengan dampak dari *sectoral shock*, akan muncul peraturan yang lebih lunak pada sektor-sektor khusus yang banyak menggunakan tenaga kerja tak tercatat (ilegal), tetapi tidak pada saat permintaan untuk tenaga kerja meningkat secara keseluruhan.

⁴ Evans Carolyn L (2000), "The Economic Significance of National Border Effect", Federal Reserve Bank of New York, March 3. hal 15

⁵ Evans Carolyn L (2000), "The Economic Significance of National Border Effect", Federal Reserve Bank of New York, March 3. hal 16

Pemikiran ini sesuai dengan masalah *free-rider* pada kelompok tertentu (Olson, 1965) yaitu untuk mencegah sektor-sektor yang mendapatkan manfaat karena longgarnya aturan diluar industri pakaian dan pertanian, yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari situasi ini⁶.

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki daerah perbatasan antar negara yang cukup panjang, yaitu sepanjang 4.800 km. Kawasan perbatasan antar negara ini memiliki potensi strategis bagi berkembangnya kegiatan perdagangan internasional, yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan negara tetangganya. Bahkan sepanjang kawasan perbatasan tersebut secara internasional telah ditetapkan sebagai daerah pertumbuhan ASEAN Timur yang lebih dikenal dengan sebutan BIMP-EAGA (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippine East Asean Growth Area).

Kawasan perbatasan antar negara tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni kawasan perbatasan berupa laut dan darat. Perbatasan yang berupa laut misalnya terletak di selat Malaka, selat Karimata, dan laut Sulawesi. Sedangkan perbatasan darat terletak di Kalimantan yang menghubungkan provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur di Indonesia dengan negara bagian Serawak dan Sabah di Malaysia, serta di Irian yang memisahkan provinsi Papua di Indonesia dengan Papua Nugini. Menurut Guo (1996), perbatasan Kalimantan dengan Serawak termasuk dalam tipe *natural border*, yaitu perbatasan yang ditandai oleh kondisi alam yaitu pengunungan Kapuas Hulu. Pada masa lalu daerah tersebut dipergunakan sebagai perbatasan karena alasan pertahanan militer⁷.

Kawasan perbatasan memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah. Menurut Evans (2000) setidaknya terdapat dua kekuatan besar yang bisa disumbangkan oleh kawasan perbatasan terhadap perekonomian. Pertama, dengan akses perdagangan yang dimiliki, kawasan perbatasan merupakan pintu masuk bagi mengalirnya devisa ke dalam negeri. Kedua, perdagangan pesat yang terjadi di perbatasan akan mendorong tumbuhnya produksi di dalam negeri.

Studi Portes dan Rey (1999) dengan menggunakan metode set data panel pada aliran modal perbatasan dua negara pada 14 negara tahun 1989-1996 menunjukkan bahwa *geography of information* secara tepat dapat menjelaskan bentuk dari transaksi internasional. Aliran aset tergantung dari besarnya pasar antara negara asal dengan negara tujuan dan didukung oleh peranan teknologi informasi. Negara yang mempunyai teknologi informasi beraneka ragam akan memperoleh transaksi perdagangan antar negara yang lebih tinggi⁸.

Di Indonesia, pengembangan kawasan perbatasan relatif masih kurang mendapat perhatian, apalagi pada saat pemerintahan bersifat sentralistik. Hal ini menyebabkan kawasan perbatasan menjadi 'daerah belakang' dari Indonesia. Keadaan ini menimbulkan adanya keterbatasan sarana dan prasarana wilayah, kesenjangan sosial, ekonomi dan teknologi dengan negara tetangga, penipisan cadangan sumberdaya alam, penyelundupan, serta pertahanan keamanan (hasil studi BPPT tahun 2000).

⁶ Hanson Gordon H dan Spilimbergo Antonio (1999), "*Political Economy, Sectoral Shocks, and Border Enforcement*", National Bureau of Economic Research, Working Paper no 7315. Hal 22.

⁷ Lihat Rongxing Guo dalam *Border-Regional Economics*, (1996) Physica-Verlag, Heidelberg, Germany. Hal 15.

⁸ Portes, Richard and Rey, Helene (1999), "*The Determinants of Cross-Border Equity Flow*", National Bureau of Economic Research, Working Paper no 7336. Hal 22.

Keterbatasan sarana dan prasarana wilayah merupakan konsekuensi logis dari kurang diperhatikannya pembangunan kawasan perbatasan. Keterbatasan ini antara lain meliputi keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, sehingga pada beberapa daerah di kawasan perbatasan Kalimantan misalnya, untuk mencapainya tidak ada akses dari dalam negeri dan oleh karenanya harus melalui luar negeri (Serawak atau Sabah) lebih dahulu.

IV. METODE ANALISIS

IV.1. Analisis Pengganda

Untuk mengetahui dampak dari kebijakan pengembangan kawasan perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat akan digunakan analisis pengganda. Analisis ini bertujuan untuk melihat dampak dari perubahan neraca eksogen (misalnya investasi pengembangan kawasan perbatasan) sebesar 1 unit terhadap pendapatan neraca endogen (faktor produksi, institusi, dan sektor produksi). Sebelum analisis pengganda diterapkan, terlebih dahulu dicari besaran yang disebut sebagai kecenderungan pengeluaran rata-rata (*average expenditure propensity*). Besaran ini dapat dihitung dengan cara membagi masing-masing elemen dari setiap neraca dengan nilai total keseluruhan. Secara matematis ditulis sebagai berikut:

$$A_{ij} = T_{ij} \cdot t_j^{-1}, \text{ atau } T_{ij} = A_{ij} \cdot t_j \quad (8)$$

dimana:

A_{ij} = kecenderungan pengeluaran rata-rata (*average expenditure propensity*) baris ke-i dan kolom ke-j

T_{ij} = elemen neraca baris ke-i dan kolom ke-j (neraca endogen).

t_j = total kolom ke-j

Dengan demikian kerangka SNSE dapat dituliskan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \\ t_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & A_{1,3} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & 0 \\ 0 & A_{3,2} & A_{3,3} \\ 0 & A_{4,2} & A_{4,3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \end{bmatrix} \quad (9)$$

Dimana, X_i adalah vektor kolom dari matrik T_{ij} untuk masing-masing $i = 1, 2, 3, 4$ (neraca eksogen). Karena A_{ij} merupakan suatu matrik dengan unsur-unsurnya yang konstan, maka persamaan (9) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & A_{1,3} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & 0 \\ 0 & A_{3,2} & A_{3,3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} \quad (10)$$

dan

$$t_4 = A_{4,2}t_2 + A_{4,3}t_3 + X_4 \quad (11)$$

Dari persamaan (11) dapat terlihat bahwa nilai t_4 dapat dicari bila t_2 dan t_3 diketahui. Neraca t_4 dan neraca X_i ($i = 1, 2, 3, 4$) merupakan neraca eksogen dalam kerangka SNSE. Selanjutnya persamaan (10) dapat ditulis dalam notasi matrik sebagai:

$$t = At + X \quad (12)$$

$$t - At = X$$

$$(I - A)t = X$$

$$t = (I - A)^{-1} X, \text{ atau } t = M_a X \quad (13)$$

dengan, $M_a = (I - A)^{-1}$ yang disebut sebagai pengganda neraca (*accounting multiplier*). Persamaan (13) menjelaskan bahwa pendapatan neraca endogen (yaitu neraca faktor produksi, neraca institusi, dan neraca sektor produksi) akan berubah sebesar M_a akibat perubahan neraca eksogen sebesar 1 unit. Dengan kata lain persamaan (13) dapat diturunkan:

$$\text{Secara umum: } \delta t = M_a \delta X \quad (14)$$

$$\text{Secara khusus: } \delta t_i / \delta X_j = Ma_{ij} \quad (15)$$

Dalam hal ini, δt_i adalah perubahan neraca endogen ke- i (misalnya perubahan pendapatan rumah tangga), δX_j adalah perubahan neraca eksogen ke- j (misalnya perubahan pengeluaran investasi di kawasan perbatasan), dan Ma_{ij} adalah pengganda neraca baris ke- i dan kolom ke- j . Persamaan (15) menjelaskan bahwa apabila pengeluaran neraca eksogen ke- j berubah sebesar 1 unit, maka pendapatan neraca endogen ke- i akan berubah sebesar Ma unit.

IV.2. Simulasi Kebijakan

Untuk menerapkan analisis pengganda di atas, terutama untuk melihat bagaimana dampak dari kebijakan pengembangan kawasan perbatasan (neraca eksogen) terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat yang meliputi pertumbuhan nilai tambah faktor produksi, pendapatan rumah tangga dan pendapatan sektor produksi (neraca endogen), maka akan dilakukan simulasi kebijakan. Simulasi kebijakan tersebut terdiri dari:

- **Simulasi 1:** Hanya pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan di kawasan perbatasan yang meningkat, masing-masing sebesar 25% dan 15%.⁹ Simulasi 1 ini akan digunakan untuk melihat dampak murni dari kenaikan pengeluaran pemerintah di kawasan perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat.
- **Simulasi 2:** Hanya investasi lokal, investasi nasional dan investasi asing di kawasan perbatasan yang meningkat masing-masing sebesar 10%, 10% dan 30%.¹⁰ Simulasi 2

⁹ Selama periode tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000, di Kalimantan Barat terjadi kenaikan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan masing-masing rata-rata sebesar 24,55% dan 15,42% (BPS Kalimantan Barat, Indikator Ekonomi 2000). Besaran angka simulasi ini didasarkan pada rata-rata kenaikan tersebut.

ini akan digunakan untuk melihat dampak murni dari kenaikan investasi di kawasan perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat.

- *Simulasi 3:* Merupakan gabungan dari simulasi 1 dengan simulasi 2. Simulasi 3 ini akan digunakan untuk melihat dampak murni dari kenaikan pengeluaran pemerintah bersamaan dengan kenaikan investasi di kawasan perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat.
- *Simulasi 4:* Hanya pengeluaran pemerintah dan investasi di kawasan non perbatasan yang meningkat masing-masing sebesar peningkatan yang terjadi di kawasan perbatasan. Simulasi 4 ini akan digunakan untuk melihat dampak murni dari kenaikan pengeluaran pemerintah bersamaan dengan kenaikan investasi di kawasan non perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat.
- *Simulasi 5:* Hanya investasi pada sektor-sektor produksi yang sesuai dengan rencana kegiatan pengembangan kawasan perbatasan yang meningkat, yaitu; investasi sektor bangunan meningkat sebesar Rp 133 milyar, investasi sektor perdagangan, hotel dan restoran meningkat sebesar Rp 50 milyar, investasi sektor angkutan darat meningkat sebesar Rp 219,52 milyar, investasi sektor angkutan lainnya dan jasa penunjang angkutan meningkat sebesar Rp 4 milyar dan investasi sektor pemerintahan umum meningkat sebesar Rp 8,55 milyar.¹⁰ Simulasi 5 ini akan digunakan untuk melihat dampak murni dari kebijakan pengembangan kawasan perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat.
- *Simulasi 6:* Merupakan dampak lanjutan dari simulasi 5, yaitu hanya investasi di sektor-sektor produksi yang meningkat. Peningkatan tersebut masing-masing sebesar peningkatan yang terjadi akibat adanya kebijakan pengembangan kawasan perbatasan. Simulasi 6 ini akan digunakan untuk melihat besarnya dampak lanjutan dari kebijakan pengembangan kawasan perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat.
- *Simulasi 7:* Merupakan gabungan dari simulasi 3 dengan simulasi 4, dimana pengeluaran pemerintah dan investasi mengalami peningkatan di seluruh Kalimantan Barat (baik di kawasan perbatasan maupun di kawasan non perbatasan). Namun besaran peningkatan tersebut masing-masing sesuai dengan *trend data* yaitu rata-rata kenaikan yang terjadi selama lima tahun terakhir (1995-2000). Simulasi 7 ini akan digunakan untuk melihat besarnya dampak kenaikan pengeluaran pemerintah dan investasi (dalam keadaan normal) terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat.
- *Simulasi 8:* Merupakan gabungan dari simulasi 4 dengan simulasi 5, dimana di kawasan non perbatasan terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dan investasi yang besarnya masing-masing sesuai dengan *trend data*, sedang di kawasan perbatasan terjadi kenaikan investasi sektor-sektor produksi sesuai dengan rencana kegiatan pengembangan kawasan perbatasan. Simulasi 8 ini akan digunakan untuk melihat besarnya dampak kebijakan pengembangan kawasan perbatasan terhadap kinerja

¹⁰ Selama periode tahun 1995-2000 realisasi proyek PMDN (investasi lokal dan nasional) mengalami peningkatan sekitar 10,10% per tahun. Sedangkan realisasi proyek PMA (investasi asing) pada periode yang sama meningkat sekitar 31,14% per tahun (Badan Pengembangan Ekonomi dan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat, 2000). Besaran angka simulasi ini didasarkan pada rata-rata kenaikan tersebut.

¹¹ Dalam "Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Perbatasan", ada banyak sektor yang akan mengalami kenaikan investasi. Namun sampai simulasi ini dilakukan baru ke-lima sektor tersebut yang besaran anggarannya sudah tercatat (terprogram). Dengan demikian, hasil perhitungan ini cenderung *under estimate*.

perekonomian Kalimantan Barat, pada saat di kawasan non perbatasan situasi ekonomi berjalan normal.

Secara umum, analisis simulasi akan fokus pada simulasi 7 dan simulasi 8, karena dari kedua simulasi itu kita akan dapat membandingkan bagaimana kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan adanya kebijakan pengembangan kawasan perbatasan, dengan kinerja perekonomian tanpa kebijakan pengembangan kawasan perbatasan. Sementara simulasi lainnya akan digunakan untuk memperkaya analisis.

IV.3. Asumsi Analisis

Model SNSE yang digunakan dalam tulisan ini didasari oleh beberapa asumsi, sebagai berikut:

1. Keseragaman (*homogeneity*), yang mensyaratkan bahwa tiap sektor memproduksi suatu output tunggal dengan struktur input tunggal dan tidak ada substitusi otomatis terhadap input dari output sektor yang berbeda-beda.
2. Kesebandingan (*proportionality*), yang menyatakan hubungan antara input dan output di dalam tiap sektor merupakan fungsi linier yaitu jumlah tiap jenis input yang diserap oleh sektor tertentu naik atau turun sebanding dengan kenaikan atau penurunan output sektor-sektor tersebut.
3. Penjumlahan (*additivity*), yang berarti bahwa efek total dari kegiatan produksi di berbagai sektor merupakan penjumlahan dari efek masing-masing kegiatan.
4. Ekses kapasitas atau kapasitas sumberdaya berlebih. Artinya, sisi penawaran selalu dapat merespon perubahan sisi permintaan, sehingga interaksi permintaan dan penawaran tidak pernah menimbulkan kesenjangan antara keduanya. Konsekuensinya harga-harga tidak pernah berubah atau harga tetap (*fixed price*) dan bersifat eksogen (tidak muncul dalam persamaan SNSE).

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1. Kinerja Perekonomian Kalimantan Barat Tanpa Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan

Bagian ini akan menganalisis hasil simulasi 7 yang merupakan gabungan dari simulasi 3 dengan simulasi 4. Dengan kata lain, pada bagian ini akan dilihat bagaimana dampak dari peningkatan pengeluaran pemerintah untuk rutin dan pembangunan masing-masing sebesar 25% dan 15% bersamaan dengan peningkatan investasi lokal, nasional dan asing masing masing sebesar 10%, 10% dan 30% terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat. Peningkatan tersebut terjadi di seluruh wilayah Kalimantan Barat, baik di kawasan perbatasan maupun di kawasan non perbatasan.

Dengan demikian berarti hasil dari simulasi 7 ini dapat juga dikatakan sebagai suatu "keadaan normal" dalam perekonomian Kalimantan Barat, karena angka-angka simulasi semata-mata hanya mengikuti *trend data*, yaitu rata-rata kenaikannya selama lima tahun terakhir.

Adapun dampak peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi tersebut terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat akan dilihat melalui besaran; (1) perubahan nilai

tambah faktor produksi, (2) perubahan pendapatan rumah tangga, dan (3) perubahan pendapatan sektor produksi yang dalam hal ini dikelompokkan menjadi sektor pertanian, industri dan jasa.

V.1.1. Perubahan Nilai Tambah Faktor Produksi

Besarnya dampak dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap nilai tambah faktor produksi ditampilkan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Dampak Peningkatan Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Nilai Tambah Faktor Produksi di Kalimantan Barat

Faktor Produksi	No	Kondisi Awal	Kenaikan		% dari Total Kenaikan
			Nilai	%	
Tenaga Kerja Profesional Teknis	1	704131,02	14010,95	1,99	1,88
Tenaga Kerja Kepemimpinan, Ketatalaksanaan	2	78536,81	2037,98	2,59	0,27
Tenaga Kerja Tata usaha dan Sejenis	3	945194,54	25504,46	2,70	3,43
Tenaga Kerja Usaha Penjualan	4	1815463,85	72471,89	3,99	9,74
Tenaga Kerja Usaha Jasa	5	384741,79	13563,79	3,53	1,82
Tenaga Kerja Usaha Pertanian	6	792304,63	32296,22	4,08	4,34
Tenaga Kerja Produksi, Operator Alat Angkut, Pekerja Kasar	7	1781279,12	61473,90	3,45	8,26
Kapital	8	15396302,60	523019,07	3,40	70,26
TOTAL		21897954,36	744378,26	3,40	100,00

Sumber: Diolah dari Simulasi 7

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa, dalam keadaan normal, peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi akan mengakibatkan total nilai tambah faktor produksi mengalami kenaikan sebesar Rp 744378,26 juta atau perekonomian Kalimantan Barat akan tumbuh sekitar 3,40 persen. Dalam hal ini, angka pertumbuhan tertinggi diterima oleh tenaga kerja usaha pertanian (6) dengan nilai sebesar 4,08 persen, sedang yang terendah diterima oleh tenaga kerja profesional, teknisi (1) dengan nilai sebesar 1,99 persen. Namun apabila dilihat dari distribusi total kenaikan nilai tambah tersebut ke masing-masing faktor produksi, maka tampak bahwa sebagian besar kenaikan tersebut ternyata diterima oleh faktor produksi modal, yaitu sekitar 70,26 persen. Sisanya sekitar 29,74 persen diterima oleh faktor produksi tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa proses produksi di Kalimantan Barat bersifat padat modal.

Khusus pada faktor produksi tenaga kerja, distribusi total kenaikan nilai tambah yang tertinggi diterima oleh tenaga kerja usaha penjualan (4) yaitu sebesar 9,74 persen dengan pertumbuhan yang juga relatif tinggi yaitu sekitar 4 persen. Ini berarti, tenaga kerja usaha penjualan di Kalimantan Barat lebih banyak memperoleh manfaat dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi dibandingkan jenis tenaga kerja yang lain. Ini disebabkan oleh nilai dampak pengganda neraca yang diterima jenis tenaga kerja ini dari neraca sektor produksi, secara umum, relatif lebih tinggi dibanding jenis tenaga kerja lainnya.

Apabila kita membandingkan dampak peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi yang berada di kawasan non perbatasan dengan yang berada di kawasan perbatasan, maka

tampak bahwa pertumbuhan ekonomi sebagian besar didorong oleh peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi yang berada di kawasan non perbatasan. Peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi di kawasan perbatasan hanya mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sangat kecil yaitu sekitar 0,16 persen. Hal ini logis mengingat selama ini proporsi pengeluaran pemerintah dan investasi di kawasan perbatasan sangat kecil, sehingga melahirkan keterbatasan baik fisik maupun sosial ekonomi seperti kesenjangan ekonomi, ketertinggalan pembangunan dan keterisolasian kawasan.

Sementara itu, dari sekitar 0,16 persen pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang dihasilkan oleh peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi di kawasan perbatasan, sebagian besar yaitu sekitar 0,12 persen merupakan hasil dari peningkatan investasi. Hanya sekitar 0,04 persen yang merupakan hasil dari peningkatan pengeluaran pemerintah. Hal ini tentu saja memberi gambaran bahwa sampai saat ini pemerintah belum mengelola kawasan perbatasan secara baik. Dengan kata lain, orientasi dan konsentrasi pembangunan ke kawasan perbatasan masih sangat lemah, sehingga kurang mendapat prioritas di dalam perencanaan pembangunan.

V.1.2. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga

Faktor produksi dimiliki oleh rumah tangga, sehingga pendapatannya harus dibagi di antara golongan rumah tangga. Tabel 3 menunjukkan besarnya dampak peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pendapatan rumah tangga di Kalimantan Barat.

Tabel 3. Dampak Peningkatan Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Kalimantan Barat

Faktor Produksi	No	Kondisi Awal	Kenaikan		% Dari Total Kenaikan
			Nilai	%	
Rumah Tangga Pertanian Buruh	9	267183,16	9096,78	3,40	2,02
Rumah Tangga Pertanian Pengusaha	10	3986964,16	135635,92	3,40	30,07
Rumah Tangga Golongan Bawah Pedesaan	11	739486,50	25143,21	3,40	5,57
Rumah Tangga Penerima Pendapatan di Pedesaan	12	318137,92	10814,12	3,40	2,40
Rumah Tangga Golongan Atas Pedesaan	13	1035827,80	35228,85	3,40	7,81
Rumah Tangga Golongan Bawah Perkotaan	14	2097966,58	71441,96	3,41	15,84
Rumah Tangga Penerima Pendapatan di Perkotaan	15	548110,20	18665,01	3,41	4,14
Rumah Tangga Golongan Atas Perkotaan	16	4280816,69	145035,36	3,39	32,15
TOTAL		13274493,01	451061,21	3,40	100,00

Sumber: Diolah dari Simulasi 7

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi berdampak menumbuhkan pendapatan rumah tangga sekitar 3,40 persen. Dalam hal ini, masing-masing golongan rumah tangga mengalami pertumbuhan pendapatan yang hampir sama besarnya, juga sekitar 3,40 persen. Dari sekitar 3,40 persen pertumbuhan pendapatan rumah tangga tersebut, sebagian besar, yaitu sekitar 3,21 persen, merupakan dampak dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi di kawasan non perbatasan. Hanya

sekitar 0,19 persen dari pertumbuhan pendapatan rumah tangga yang merupakan dampak dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi di kawasan perbatasan.

Hal lain yang dapat dilihat pada Tabel 3 adalah mengenai distribusi total kenaikan pendapatan rumah tangga. Peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi berdampak meningkatkan total pendapatan rumah tangga sebesar Rp 451061,21 juta. Total kenaikan pendapatan tersebut didistribusikan ke masing-masing golongan rumah tangga. Dari sini akan terlihat bahwa ternyata rumah tangga golongan atas di perkotaan (16) dan rumah tangga pertanian pengusaha (10) memperoleh bagian terbesar dari kenaikan pendapatan tersebut yaitu masing-masing sebesar 32,15 persen dan 30,07 persen. Sementara rumah tangga buruh tani (9) memperoleh bagian paling kecil yaitu hanya sebesar 2,02 persen. Hal ini tentu saja disebabkan oleh perbedaan dampak pengganda neraca yang diterima masing-masing golongan rumah tangga dari neraca sektor produksi. Dimana rumah tangga golongan atas di perkotaan (16) dan rumah tangga pertanian pengusaha (10) menerima dampak pengganda neraca relatif tinggi, dari semua neraca sektor produksi. Sebaliknya rumah tangga buruh tani (9) selalu menerima dampak pengganda neraca paling rendah dari hampir semua neraca sektor produksi.

V.1.3. Perubahan Pendapatan Sektor Produksi

Peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi juga mendorong pertumbuhan pendapatan neraca sektor produksi masing-masing sebesar 4,55 persen untuk sektor pertanian, 3,51 persen untuk sektor industri dan 4,08 persen untuk sektor jasa. Untuk lebih jelasnya, dampak peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap neraca sektor produksi dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 . Dampak Peningkatan Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pendapatan Neraca Sektor Produksi di Kalimantan Barat

Faktor Produksi	No	Kondisi Awal	Kenaikan		% Dari Total Kenaikan
			Nilai	%	
Padi	21	971953,94	32879,94	3,38	10,95
Tanaman Bahan Makanan Lainnya	22	703568,60	32201,75	4,58	10,72
Karet Lateks	23	615299,98	46867,85	7,62	15,60
Kelapa	24	1196948,31	99344,60	8,30	33,07
Tanaman Perkebunan Lainnya	25	99417,35	6710,77	6,75	2,23
Peternakan	26	635516,96	20843,85	3,28	6,94
Kayu	27	1615886,50	41047,77	2,54	13,67
Hasil Hutan Lainnya	28	82636,79	2135,92	2,58	0,71
Perikanan	29	681270,22	18347,69	2,69	6,11
TOTAL PERTANIAN		6602498,65	300380,14	4,55	100,00
Pertambangan Penggalian	30	391577,17	3002,52	0,77	0,47
Industri Minyak Sawit (CPO)	31	868310,07	81606,04	9,40	12,67
Industri Makanan, Minuman dan Tembakau	32	1731006,06	59203,52	3,42	9,19
Industri Kayu	33	7784730,85	273668,69	3,52	42,47
Industri Karet dan Barang dari Karet	34	1275764,51	100895,05	7,91	15,66
Industri Pengolahan Lainnya	35	2020970,11	89612,23	4,43	13,90
Listrik dan Air Minum	36	286030,60	10755,39	3,76	1,67
Bangunan	37	4010405,49	25592,76	0,64	3,97
TOTAL INDUSTRI		18368794,86	644336,20	3,51	100,00
Perdagangan, Hotel dan Restoran	38	5049159,74	265950,99	5,27	62,83
Angkutan Darat	39	486308,14	20671,94	4,25	4,88
Angkutan Lainnya dan Jasa Penunjang Angkutan	40	1302936,63	55160,29	4,23	13,03
Komunikasi	41	257998,07	9658,66	3,74	2,28
Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	42	1562607,28	56149,89	3,59	13,27
Jasa Sosial Kemasyarakatan dan Hiburan	44	25209,76	826,89	3,28	0,20
Jasa Penseorangan dan Rumah Tangga	45	45981,22	1521,22	3,31	0,36
TOTAL JASA		10375348,90	423265,31	4,08	100,00

Sumber: Diolah dari Simulasi 7

Pada Tabel 4 terlihat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi mengakibatkan terjadinya kenaikan pendapatan di sektor pertanian sebesar Rp 300380,14 juta atau tumbuh sekitar 4,55 persen. Adapun sektor produksi pertanian yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor kelapa (24) yaitu sekitar 8,30 persen, sebaliknya yang terendah adalah sektor kayu (27) yaitu hanya sekitar 2,54 persen. Hal tersebut terlihat wajar mengingat pada tahun 2000, sektor perkebunan merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 10,94 persen, sedangkan sektor kehutanan pertumbuhannya terendah yaitu -3,30 persen (BPS Kalimantan Barat, 2000).¹²

Tingginya pertumbuhan sektor perkebunan khususnya selama lima tahun terakhir (pertumbuhan rata-rata 1996-2000 sekitar 15,48 persen per tahun) ternyata mampu menggeser posisi kontribusi sektor kehutanan terhadap pertanian. Tahun 1997 sektor kehutanan sebagai *leading* pada sektor pertanian dengan kontribusi sekitar 33,42 persen. Sedangkan pada tahun tersebut kontribusi sektor perkebunan terhadap sektor pertanian sekitar 25,13 persen. Memasuki tahun 2000, kontribusi sektor perkebunan terhadap sektor pertanian mencapai sekitar 32,60 persen yang menempatkannya sebagai sektor utama (*leading*) menggantikan sektor kehutanan yang pada tahun tersebut kontribusinya menurun menjadi 26,63 persen.

Apabila dilihat dari distribusi total kenaikan pendapatan sektor pertanian ke masing-masing sektor dalam lingkup sektor pertanian, maka tampak bahwa sektor kelapa (24) juga memperoleh bagian terbesar dari kenaikan tersebut yaitu sekitar 33,07 persen. Sebaliknya, sektor hasil hutan lainnya (28) menerima bagian terkecil yaitu hanya sekitar 0,71 persen. Hal ini tentu saja juga dipengaruhi oleh kondisi awal simulasi, dimana sektor kelapa memiliki output tertinggi, dan sebaliknya sektor hasil hutan lainnya memiliki output terendah dibanding sektor-sektor lainnya dalam lingkup sektor pertanian.

Sementara itu, dalam keadaan normal, ternyata sektor industri akan mengalami tingkat pertumbuhan paling rendah dibanding sektor pertanian dan sektor jasa. Sektor ini diperkirakan hanya akan tumbuh sekitar 3,51. Angka pertumbuhan ini ternyata juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri pada tahun 2000 yang besarnya 4,28 persen.

Rendahnya pertumbuhan sektor industri tersebut diperkirakan karena realisasi investasi (PMDN dan PMA) pada tahun 2000, yang sebagian besar berada pada sektor pertanian, khususnya sektor perkebunan. Pada tahun 2000, *share* investasi proyek PMDN sektor perkebunan terhadap total investasi mencapai 66,06 persen. Sedangkan *share* investasi proyek PMA sektor perkebunan terhadap total investasi mencapai 58,56 persen (BPEK Kalimantan Barat, 2000).

Dari delapan sektor yang masuk dalam lingkup sektor industri, pertumbuhan tertinggi berada pada sektor industri minyak sawit (CPO) yaitu sekitar 9,40 persen. Ini mungkin merupakan dampak lanjutan dari besarnya minat investor pada perkebunan kelapa sawit, yang ternyata juga mendorong mereka untuk menanamkan modalnya ke industri turunannya. Sebaliknya, pertumbuhan terendah berada pada sektor bangunan (37) dan pertambangan dan penggalian (30) yaitu masing-masing hanya sekitar 0,64 persen dan 0,77 persen. Khusus sektor pertambangan dan penggalian walaupun kontribusinya terhadap perekonomian relatif kecil yaitu hanya sebesar 1,47 persen, namun melihat

¹² Sektor kelapa terdiri dari perkebunan kelapa dalam dan kelapa sawit. Dalam perekonomian 9 sektor, sektor kelapa masuk dalam sektor perkebunan. Di Kalimantan Barat sektor kelapa ini menjadi bagian terbesar dari sektor perkebunan. Demikian pula halnya sektor kayu yang dalam perekonomian 9 sektor menjadi bagian terbesar dari sektor kehutanan.

potensi salah satu barang tambang yaitu bauksit yang cukup tinggi, memberi harapan akan pentingnya sektor ini di masa depan. Berdasarkan hasil eksplorasi PT. Aneka Tambang yang dilakukan sejak tahun 1991 di kabupaten Sanggau, ditemukan cadangan bauksit untuk produksi 50 tahun (Kanwil Pertambangan Kalimantan Barat, 2000).

Dilihat dari distribusi total kenaikan pendapatan sektor industri ke masing-masing sektor dalam lingkup sektor industri, maka tampak bahwa sektor industri kayu (33) memperoleh bagian terbesar dari kenaikan tersebut yaitu sekitar 42,47 persen. Hal ini paling tidak menunjukkan, meskipun peranan industri kayu dalam perekonomian cenderung menurun namun *share*-nya terhadap nilai tambah bruto sektor industri masih dominan. Pada tahun 2000 *share* industri kayu terhadap nilai tambah bruto sektor industri adalah sekitar 55,91 persen. Sektor lain yang memperoleh distribusi total kenaikan pendapatan sektor industri relatif besar adalah sektor industri karet dan barang dari karet (34) dan industri pengolahan lainnya (35) masing-masing sekitar 15,66 persen dan 13,90 persen.

Pada sektor jasa, seperti telah dikemukakan sebelumnya, peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi mendorong terjadinya pertumbuhan pendapatan sektor ini sekitar 4,08 persen. Berbeda dengan sektor pertanian dan sektor industri yang besaran tingkat pertumbuhan pada masing-masing sektornya sangat bervariasi, pada sektor jasa besaran tingkat pertumbuhan pada masing-masing sektor hampir sama kecuali sektor pemerintahan umum. Dengan demikian, dalam keadaan normal, injeksi berupa peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi dalam perekonomian, akan menggerakkan masing-masing sektor dalam lingkup sektor jasa dengan kecepatan yang hampir sama.

Pertumbuhan pendapatan tertinggi dalam sektor jasa berada pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh sekitar 5,27 persen. Kemudian diikuti oleh sektor angkutan darat (39) dan sektor angkutan lainnya dan jasa penunjang angkutan (40) yang masing-masing tumbuh sekitar 4,25 persen dan 4,23 persen. Perkiraan pertumbuhan pendapatan sektor perdagangan, hotel dan restoran tersebut ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhannya selama periode tahun 1994-2000 yang besarnya sekitar 4,05 persen (BPS Kalimantan Barat, 2000). Relatif rendahnya pertumbuhan sektor ini selama tahun 1994-2000 karena pengaruh krisis, sehingga pada tahun 1998 pertumbuhannya menjadi -8,02 persen.

Pada Tabel 4 juga tampak bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi berdampak menaikkan total pendapatan sektor jasa sebesar Rp 423265,31 juta. Total kenaikan pendapatan ini didistribusikan ke masing-masing sektor yang ada dalam lingkup sektor jasa. Dari sini terlihat bahwa ternyata sebagian besar, yaitu sekitar 62,83 persen dari total kenaikan pendapatan tersebut juga akan diterima oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kenyataan ini sangat mungkin disebabkan oleh begitu besarnya peran sektor ini dalam struktur perekonomian Kalimantan Barat. Sebagai gambaran, struktur perekonomian Kalimantan Barat rata-rata lima tahun terakhir menunjukkan empat sektor utama yang memberi kontribusi tertinggi yaitu pertanian dalam arti luas dengan rata-rata kontribusinya 23,68 persen per tahun, sektor perdagangan, hotel dan restoran (19,89 persen per tahun), sektor industri pengolahan (19,17 persen per tahun) dan sektor jasa lainnya (11,48 persen per tahun). Dengan demikian apabila sektor pertanian dirinci menurut sub sektornya, maka dapat dipastikan sektor perdagangan, hotel dan restoran akan menjadi pemberi kontribusi tertinggi dalam perekonomian Kalimantan Barat.

Secara umum, pertumbuhan pendapatan neraca sektor produksi sebagian besar merupakan dampak dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi yang berada di kawasan non perbatasan. Hanya sekitar 0,18 persen pertumbuhan sektor pertanian, 0,17 persen pertumbuhan sektor industri dan 0,20 persen pertumbuhan sektor jasa yang merupakan

dampak murni dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi yang berada di kawasan perbatasan.

V.2. Kinerja Perekonomian Kalimantan Barat Dengan Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan

Bagian ini akan menganalisis hasil simulasi 8 yang merupakan gabungan dari simulasi 4 dan simulasi 5. Pada simulasi 5 kita beranggapan bahwa, investasi pada sektor-sektor produksi yang sesuai dengan rencana kegiatan pengembangan kawasan perbatasan mengalami peningkatan, yaitu; investasi sektor bangunan meningkat sebesar Rp 133 milyar, investasi sektor perdagangan, hotel dan restoran meningkat sebesar Rp 50 milyar, investasi sektor angkutan darat meningkat sebesar Rp 219,52 milyar, investasi sektor angkutan lainnya dan jasa penunjang angkutan meningkat sebesar Rp 4 milyar dan investasi sektor pemerintahan umum meningkat sebesar Rp 8,55 milyar. Simulasi 5 ini akan digunakan untuk melihat dampak murni dari kebijakan pengembangan kawasan perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat.

Sementara itu, pada simulasi 4 kita beranggapan bahwa keadaan perekonomian di kawasan non perbatasan berjalan normal, dimana terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi yang besarnya sesuai dengan *trend data*. Dengan kata lain, pengeluaran pemerintah untuk rutin dan pembangunan meningkat masing-masing sebesar 25% dan 15%, sedangkan investasi lokal, nasional dan asing juga meningkat masing-masing sebesar 10%, 10% dan 30%.

Dengan demikian, pada bagian ini akan dianalisis bagaimana dampak kebijakan pengembangan kawasan perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat, pada saat keadaan ekonomi di kawasan non perbatasan berjalan normal. Seperti pada bagian sebelumnya, kinerja perekonomian tersebut akan dilihat melalui besaran; (1) perubahan nilai tambah faktor produksi, (2) perubahan pendapatan rumah tangga, dan (3) perubahan pendapatan sektor produksi yang dalam hal ini dikelompokkan menjadi sektor pertanian, industri dan jasa.

V.2.1. Perubahan Nilai Tambah Faktor Produksi

Besarnya dampak kebijakan pengembangan kawasan perbatasan terhadap nilai tambah faktor produksi ditampilkan pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Terhadap Nilai Tambah Faktor Produksi di Kalimantan Barat

Faktor Produksi	No	Kondisi Awal	Kenalkan		% Dari Total Kenalkan
			Nilai	%	
Tenaga Kerja Profesional Teknis	1	704131,02	26105,56	3,71	2,23
Tenaga Kerja Kepemimpinan, Ketatalaksanaan	2	78536,81	3639,75	4,63	0,32
Tenaga Kerja Tata usaha dan Sejenis	3	945194,54	36455,73	3,86	3,13
Tenaga Kerja Usaha Penjualan	4	1815463,85	96732,64	5,33	8,27
Tenaga Kerja Usaha Jasa	5	384741,79	19081,79	4,96	1,63
Tenaga Kerja Usaha Pertanian	6	792304,63	58571,02	7,39	5,00
Tenaga Kerja Produksi, Operator Alat Angkut, Pekerja Kasar	7	1781279,12	108971,70	6,12	9,32
Kapital	8	15396302,60	819627,00	5,32	70,10
TOTAL		21897954,36	1169185,19	5,34	100,00

Sumber: Diolah dari Lampiran 2, Simulasi 8

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa dengan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan, maka total nilai tambah faktor produksi akan naik sebesar Rp 1169185,19 juta atau tumbuh sekitar 5,34 persen. Pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tanpa pengembangan kawasan perbatasan (simulasi 7) yang hanya sekitar 3,40 persen. Demikian pula jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000 yang besarnya hanya sekitar 2,95 persen. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum krisis (1994-1997) yang besarnya mencapai 8,83 persen.

Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sekitar 7,39 persen akan dinikmati oleh tenaga kerja usaha pertanian (6). Berbeda dengan simulasi 7, dengan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan ternyata pertumbuhan ekonomi tertinggi berikutnya akan dinikmati oleh tenaga kerja produksi, operator alat angkut dan pekerja kasar (7) yaitu sekitar 6,12 persen. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingginya peningkatan investasi di sektor bangunan yang banyak membutuhkan jasa dari jenis tenaga kerja ini. Khusus pada faktor produksi tenaga kerja, jenis tenaga kerja ini juga memperoleh bagian terbesar dari distribusi total kenaikan nilai tambah faktor produksi yaitu sekitar 9,32 persen, menggeser tenaga kerja usaha pertanian yang pada simulasi 7 memperoleh bagian terbesar.

Namun demikian, sebagian besar dari distribusi total kenaikan nilai tambah faktor produksi masih akan diterima oleh faktor produksi modal yaitu sekitar 70,10 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan hasil simulasi 7 yang besarnya sekitar 70,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proses produksi di Kalimantan Barat tanpa atau dengan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan tetap bersifat padat modal. Dari sekitar 5,34 persen pertumbuhan ekonomi (nilai tambah faktor produksi) ternyata sekitar 2,10 persen merupakan dampak murni dari kebijakan pengembangan kawasan perbatasan. Angka ini jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan keadaan sebelum adanya kebijakan pengembangan kawasan perbatasan, dimana dampak murni dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi di kawasan perbatasan hanya sekitar 0,16 persen.

V.2.2. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa faktor produksi dimiliki oleh rumah tangga, sehingga pendapatannya harus dibagi di antara golongan rumah tangga. Tabel 6 menunjukkan besarnya dampak kebijakan pengembangan kawasan perbatasan terhadap pendapatan rumah tangga di Kalimantan Barat.

Tabel 6. Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Kalimantan Barat

Faktor Produksi	No	Kondisi Awal	Kenaikan		% Dari Total Kenaikan
			Nilai	%	
Rumah Tangga Pertanian Buruh	9	267183,16	14386,24	5,38	2,03
Rumah Tangga Pertanian Pengusaha	10	3986964,16	213357,12	5,35	30,07
Rumah Tangga Golongan Bawah Pedesaan	11	739486,50	39651,00	5,36	5,59
Rumah Tangga Penerima Pendapatan di Pedesaan	12	318137,92	17064,12	5,36	2,40
Rumah Tangga Golongan Atas Pedesaan	13	1035827,80	55545,88	5,36	7,83
Rumah Tangga Golongan Bawah Perkotaan	14	2097966,58	112668,02	5,37	15,88
Rumah Tangga Penerima Pendapatan di Perkotaan	15	548110,20	29513,78	5,38	4,16
Rumah Tangga Golongan Atas Perkotaan	16	4280816,69	227350,07	5,31	32,01
TOTAL		13274493,01	709536,23	5,35	100,00

Sumber: Diolah dari Lampiran 2, Simulasi 8

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa kebijakan pengembangan kawasan perbatasan berdampak menaikkan pendapatan rumah tangga sebesar Rp 709536,23 juta atau tumbuh sekitar 5,35 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan rumah tangga yang terjadi tanpa kebijakan pengembangan kawasan perbatasan (simulasi 7). Dalam hal ini, variasi tingkat pertumbuhan di antara masing-masing golongan rumah tangga relatif kecil. Artinya, masing-masing golongan rumah tangga akan mengalami pertumbuhan yang hampir sama besarnya.

Pertumbuhan pendapatan tertinggi, sebagai dampak dari kebijakan pengembangan kawasan perbatasan, akan dinikmati oleh rumah tangga buruh tani (9) yaitu sekitar 5,38 persen. Sebaliknya pertumbuhan pendapatan terendah justru akan dialami oleh rumah tangga golongan atas di perkotaan (16) yaitu sekitar 5,31 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kebijakan pengembangan kawasan perbatasan tidak akan mengganggu distribusi pendapatan di Kalimantan Barat. Bahkan terdapat kecenderungan, meskipun relatif kecil, dengan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan distribusi pendapatan di Kalimantan Barat akan semakin merata. Kecenderungan ini tampak dari, rumah tangga buruh tani sebagai rumah tangga paling miskin di Kalimantan Barat akan mengalami pertumbuhan pendapatan tertinggi, sebaliknya rumah tangga golongan atas di perkotaan sebagai rumah tangga terkaya justru akan mengalami pertumbuhan pendapatan terendah.

Apabila diperhatikan distribusi dari total kenaikan pendapatan rumah tangga tersebut ke masing-masing golongan rumah tangga, akan terlihat bahwa rumah tangga golongan atas di perkotaan dan rumah tangga pertanian pengusaha tetap akan memperoleh bagian terbesar, yaitu masing-masing sekitar 32,04 persen dan 30,07 persen. Sebaliknya, rumah tangga buruh tani akan memperoleh bagian terkecil yaitu hanya sekitar 2,03 persen. Keadaan ini hampir sama dengan keadaan pada saat perekonomian tanpa kebijakan pengembangan kawasan perbatasan (simulasi 7). Sebagaimana argumentasi pada bagian sebelumnya, kemungkinan keadaan ini disebabkan oleh perbedaan dampak pengganda neraca yang diterima masing-masing golongan rumah tangga dari neraca sektor produksi. Dimana rumah tangga golongan atas di perkotaan (16) dan rumah tangga pertanian pengusaha (10) menerima dampak pengganda neraca relatif tinggi, dari semua neraca sektor produksi. Sebaliknya rumah tangga buruh tani (9) selalu menerima dampak pengganda neraca paling rendah dari hampir semua neraca sektor produksi.

V.2.3. Perubahan Pendapatan Sektor Produksi

Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan berdampak menumbuhkan pendapatan neraca sektor produksi, masing-masing sekitar 5,75 persen untuk sektor pertanian, 4,89 persen untuk sektor industri dan 7,85 persen untuk sektor jasa. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan neraca sektor produksi pada saat perekonomian dalam keadaan normal (simulasi 7). Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan dampak kebijakan pengembangan kawasan perbatasan terhadap pertumbuhan pendapatan neraca sektor produksi di Kalimantan Barat, ditampilkan pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7 menunjukkan bahwa total pendapatan sektor pertanian akan mengalami kenaikan sebesar Rp 379503,9 juta atau tumbuh sekitar 5,75 persen, sebagai dampak dari kebijakan pengembangan kawasan perbatasan. Angka pertumbuhan tertinggi tetap berada pada sektor kelapa (24) yaitu sekitar 8,23 persen. Namun angka pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhannya pada saat simulasi 7 (tanpa kebijakan pengembangan kawasan perbatasan) yang besarnya sekitar 8,30 persen. Sektor ini menjadi satu-satunya sektor dalam lingkup sektor pertanian yang pertumbuhannya lebih rendah dibanding pertumbuhan hasil simulasi 7. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan

investasi di kawasan perbatasan, yang dalam simulasi 8 terjadi pada sektor-sektor yang kurang erat kaitannya dengan sektor kelapa.

Tabel 7. Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Terhadap Pendapatan Neraca Sektor Produksi di Kalimantan Barat

Faktor Produksi	No	Kondisi Awal	Kenaikan		% Dari Total Kenaikan
			Nilai	%	
Padi	21	971953,94	51788,45	5,33	13,65
Tanaman Bahan Makanan Lainnya	22	703568,60	43306,28	6,16	11,41
Karet Lateks	23	615299,98	48907,15	7,95	12,89
Kelapa	24	1196948,31	98552,34	8,23	25,97
Tanaman Perkebunan Lainnya	25	99417,35	7530,03	7,57	1,98
Peternakan	26	635516,96	33398,05	5,26	8,80
Kayu	27	1615886,50	63876,59	3,95	16,83
Hasil Hutan Lainnya	28	82636,79	3646,83	4,41	0,96
Perikanan	29	681270,22	28498,18	4,18	7,51
TOTAL PERTANIAN		6602498,65	379503,90	5,75	100,00
Pertambangan Pengalihan	30	391577,17	15854,69	4,05	1,76
Industri Minyak Sawit (CPO)	31	868310,07	79615,10	9,17	8,86
Industri Makanan, Minuman dan Tembakau	32	1731006,06	93302,87	5,39	10,39
Industri Kayu	33	7784730,85	311907,20	4,01	34,72
Industri Karet dan Barang dari Karet	34	1275764,51	105339,03	8,26	11,73
Industri Pengolahan Lainnya	35	2020970,11	117194,55	5,80	13,05
Listrik dan Air Minum	36	286030,60	15104,57	5,28	1,68
Bangunan	37	4010405,49	159985,11	3,99	17,81
TOTAL INDUSTRI		18368794,86	898303,12	4,89	100,00
Perdagangan, Hotel dan Restoran	38	5049159,74	347090,93	6,87	42,64
Angkutan Darat	39	486308,14	250127,82	51,43	30,73
Angkutan Lainnya dan Jasa Penunjang Angkutan	40	1302936,63	85116,46	6,53	10,46
Komunikasi	41	257998,07	15635,44	6,06	1,92
Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	42	1562607,28	91102,32	5,83	11,19
Pemerintahan Umum	43	1645148,06	21539,99	1,31	2,65
Jasa Sosial Kemasyarakatan dan Hiburan	44	25209,76	1308,12	5,19	0,16
Jasa Penseorangan dan Rumah Tangga	45	45981,22	2092,92	4,55	0,25
TOTAL JASA		10375348,90	814014,00	7,85	100,00

Sumber: Diolah dari Simulasi 8

Sebaliknya, pertumbuhan terendah juga tetap berada pada sektor industri kayu (27) yaitu hanya sekitar 3,95 persen. Meskipun demikian, angka pertumbuhan ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhannya dalam simulasi 7 yang hanya sekitar 2,54 persen. Ini terjadi karena peningkatan investasi di kawasan perbatasan, khususnya sektor bangunan, memiliki keterkaitan erat dengan sektor industri kayu dilihat dari besarnya dampak pengganda neraca.

Seperti dalam simulasi 7, sektor kelapa juga akan memperoleh bagian terbesar dari distribusi total kenaikan pendapatan sektor pertanian yaitu sekitar 25,97 persen. Namun angka ini jauh lebih rendah dibandingkan hasil simulasi 7 yang besarnya mencapai 33,07 persen. Dalam hal ini, sektor kayu akan memperoleh bagian terbesar kedua setelah sektor kelapa, yaitu sekitar 16,83 persen. Padahal dari hasil simulasi 7 sektor kayu hanya memperoleh sekitar 13,67 persen, masih lebih rendah dibandingkan yang diperoleh sektor kelapa (33,07 persen) dan sektor karet lateks (15,60 persen).

Sementara itu, dengan adanya kebijakan pengembangan kawasan perbatasan ternyata sektor industri tetap saja mengalami tingkat pertumbuhan paling rendah dibanding sektor pertanian dan sektor jasa. Sektor ini diperkirakan hanya akan tumbuh sekitar 4,89 persen. Namun demikian, angka pertumbuhan ini sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri pada tahun 2000 yang besarnya sekitar 4,28 persen.

Rendahnya pertumbuhan sektor industri tersebut diperkirakan karena, secara makro, ekonomi perbatasan sampai saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian dan sektor jasa. Hal ini terjadi di hampir semua kabupaten perbatasan, kecuali kabupaten Sanggau. Hanya di kabupaten Sanggau, pada tahun 2000 sektor industri berada pada posisi kedua setelah sektor pertanian (39,01 persen) dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 34,14 persen.

Seperti hasil simulasi 7, dari delapan sektor yang masuk dalam lingkup sektor industri, pertumbuhan tertinggi masih tetap berada pada sektor industri minyak sawit (CPO) yaitu sekitar 9,17 persen. Sebaliknya, pertumbuhan terendah berada pada sektor bangunan (37) yaitu hanya sekitar 3,99 persen. Namun khusus untuk sektor bangunan, pertumbuhan ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhannya dari hasil simulasi 7 yang hanya sekitar 0,64 persen. Kenaikan pertumbuhan ini tentu saja disebabkan oleh peningkatan investasi sektor bangunan di kawasan perbatasan yang besarnya mencapai Rp 133 milyar.

Dilihat dari distribusi total kenaikan pendapatan sektor industri ke masing-masing sektor dalam lingkup sektor industri, maka tampak bahwa sektor industri kayu (33) memperoleh bagian terbesar dari kenaikan tersebut yaitu sekitar 34,72 persen. Dalam hal ini, peningkatan yang cukup dramatis akan dialami oleh sektor bangunan. Apabila sebelumnya sektor bangunan hanya memperoleh distribusi total kenaikan pendapatan sektor industri sekitar 3,97 persen, maka dengan adanya kebijakan pengembangan kawasan perbatasan sektor ini akan memperoleh sekitar 17,81 persen.

Dalam kebijakan pengembangan kawasan perbatasan, sektor jasa akan memperoleh peningkatan investasi tertinggi. Akibatnya sektor ini, seperti telah dikemukakan sebelumnya, juga akan menikmati pertumbuhan pendapatan tertinggi yaitu sekitar 7,85 persen. Berbeda dengan hasil simulasi 7, dimana besaran tingkat pertumbuhan pada masing-masing sektor dalam lingkup sektor jasa kurang bervariasi, dengan adanya kebijakan pengembangan kawasan perbatasan maka besaran tingkat pertumbuhan pada masing-masing sektor menjadi sangat bervariasi. Dengan demikian, kebijakan pengembangan kawasan perbatasan akan menggerakkan masing-masing sektor dalam lingkup sektor jasa dengan kecepatan yang berbeda.

Pertumbuhan pendapatan tertinggi dalam sektor jasa berada pada sektor angkutan darat yang mencapai sekitar 51,43 persen. Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (38) dan sektor angkutan lainnya dan jasa penunjang angkutan (40) yang masing-masing tumbuh sekitar 6,87 persen dan 6,53 persen. Tingginya pertumbuhan sektor angkutan darat tentu saja disebabkan oleh rencana kegiatan dalam pengembangan kawasan perbatasan yang akan meningkatkan investasi di sektor ini sebesar Rp 219,52 milyar.

Pada Tabel 7 juga tampak bahwa kebijakan pengembangan kawasan perbatasan berdampak menaikkan total pendapatan sektor jasa sebesar Rp 814014 juta. Total kenaikan pendapatan ini didistribusikan ke masing-masing sektor yang ada dalam lingkup sektor jasa. Dari sini terlihat bahwa ternyata sebagian besar, yaitu sekitar 42,64 persen dari total kenaikan pendapatan tersebut akan diterima oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Angka ini tentu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya (simulasi 7) yang besarnya mencapai 62,83 persen. Sementara sektor angkutan darat akan memperoleh sekitar 30,73 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan hasil simulasi 7 yang hanya sekitar 4,88 persen.

Secara umum, pertumbuhan pendapatan pada sektor pertanian dan sektor industri sebagian besar masih merupakan dampak dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi

yang berada di kawasan non perbatasan. Hanya sekitar 1,37 persen pertumbuhan sektor pertanian dan 1,55 persen pertumbuhan sektor industri yang merupakan dampak murni dari kebijakan pengembangan kawasan perbatasan. Meskipun demikian, angka tersebut sudah jauh lebih tinggi dibandingkan jika tanpa kebijakan pengembangan kawasan perbatasan, dimana besarnya masing-masing hanya sekitar 0,18 persen dan 0,17 persen. Untuk sektor jasa, sebagian besar pertumbuhannya yaitu sekitar 3,96 persen merupakan dampak dari kebijakan pengembangan kawasan perbatasan, jauh mengalami kenaikan dari sebelumnya yang hanya 0,20 persen.

Disamping itu, hal lain yang menarik untuk diperhatikan adalah mengenai dampak lanjutan dari kebijakan pengembangan kawasan perbatasan. Kenaikan pendapatan neraca sektor produksi yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan pengembangan kawasan perbatasan, diperlakukan sebagai peningkatan investasi sektor-sektor produksi, lalu kemudian dilihat dampaknya terhadap kinerja perekonomian (simulasi 6). Inilah yang dimaksud sebagai dampak lanjutan dari kebijakan pengembangan kawasan perbatasan.

Pengolahan terhadap hasil perhitungan simulasi 6 menunjukkan bahwa dampak lanjutan dari kebijakan pengembangan kawasan perbatasan, *ceteris paribus*, akan menghasilkan; (1) pertumbuhan ekonomi (nilai tambah faktor produksi) sekitar 4,15 persen, (2) pertumbuhan pendapatan rumah tangga sekitar 4,18 persen, (3) pertumbuhan pendapatan sektor pertanian sekitar 4,32 persen, (4) pertumbuhan pendapatan sektor industri sekitar 3,05 persen dan (5) pertumbuhan pendapatan sektor jasa sekitar 6,59 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan kawasan perbatasan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian Kalimantan Barat.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

VI.1. Kesimpulan

1. Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan menghasilkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,34 persen. Pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tanpa pengembangan kawasan perbatasan, yang hanya sekitar 3,40 persen.
2. Kebijakan ini juga berdampak menaikkan pendapatan rumah tangga sekitar 5,35 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan rumah tangga yang terjadi tanpa kebijakan pengembangan kawasan perbatasan.
3. Pertumbuhan pendapatan tertinggi akan dinikmati oleh rumah tangga buruh tani (9) yaitu sekitar 5,38 persen. Sebaliknya pertumbuhan pendapatan terendah justru akan dialami oleh rumah tangga golongan atas di perkotaan (16) yaitu sekitar 5,31 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kebijakan pengembangan kawasan perbatasan tidak akan mengganggu distribusi pendapatan di Kalimantan Barat.
4. Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan juga berdampak menumbuhkan pendapatan neraca sektor produksi, masing-masing sekitar 5,75 persen untuk sektor pertanian, 4,89 persen untuk sektor industri dan 7,85 persen untuk sektor jasa. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan neraca sektor produksi pada saat perekonomian dalam keadaan normal.
5. Hasil-hasil tersebut memberi gambaran bahwa kebijakan pengembangan kawasan perbatasan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian Kalimantan Barat. Hal ini

terjadi karena adanya peningkatan skala ekonomi dan pengaruh positif dari *spread effect* yang meliputi investasi, inovasi dan pertumbuhan dari daerah pusat (*core*) ke daerah pinggiran (*periphery*).

VI.2. Rekomendasi

1. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan kawasan perbatasan dapat meningkatkan kinerja perekonomian Kalimantan Barat. Untuk mengefektifkan dan mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan tersebut maka sebaiknya di sepanjang kawasan diberlakukan sebagai kawasan khusus, yang dikelola oleh sebuah Badan Otorita dengan Gubernur sebagai Pelaksana Harian.
2. Agar kawasan khusus tersebut terkelola dengan baik serta dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah pusat perlu segera menyerahkan beberapa kewenangan kepada daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan yang mudah dan cepat, seperti kebijakan pertanahan, perumahan, perizinan investasi asing, prosedur ekspor-impor dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia Pontianak.** *Laporan Triwulanan Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kalimantan Barat*, 2001.
- Bank Indonesia.** *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, beberapa terbitan.
- BAPPEDA Kalimantan Barat.** "Rencana pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan Kalimantan-Sarawak", Bahan diskusi dalam rangka Pembahasan Rencana Pembangunan Kawasan Perbatasan di BPPT Jakarta, 2001.
- Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.** *Tinjauan Perekonomian Kalimantan Barat Tahun 2000*, 2000.
- Cohen, S.I.** "Multiplier Analysis in Social Accounting and Input-Output Framework: Eviden for Several Countries" dalam Miller, R.E., K.R. Polenske and A. Rose (eds.), *Frontier of Input-Output Analysis*. Oxford University Press, 1989, hal. 78-99.
- Evans Carolyn L.** "The Economic Significance of National Border Effect", *Federal Reserve Bank of New York*, 2000.
- Guo, Rongxing.** *Border-Regional Economics*, Heidelberg: Physica-Verlag, 1996.
- Hamid, Sri Handoyo Mukti dan Tien Widiyanto.** *Kawasan Perbatasan Kalimantan: Permasalahan dan Konsep Pengembangan*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, BPPT, 2001.
- Hanson Gordon H dan Spilimbergo Antonio.** "Political Economy, Sectoral Shocks, and Border Enforcement." National Bureau of Economic Research Working Paper No. 7315, 1999.
- Keuning, S.J. and Willem de Ruijter.** "The Social Accounting Framework: Outline of Construction Stages and Organization of Work" dalam J. Alarcon, J.v. Heemst, S. Keuning, W.de Ruijter and R. Vos (eds.), *The Social Accounting Framework for Development: Concepts, Construction and Applications*. Avebury, 1990, hal. 191-221.
- Khan, H. and E. Thorbecke.** "Macroeconomic Effect of Technology Choice: Multiplier and Structural Path Analysis within a SAM Framework." *Journal of Policy Modeling*, 1989, 11(1), hal. 131-156.

- King, B.B.** "What is a SAM?" dalam G. Pyatt and J.I. Round (eds.), *Social Accounting Matrices: A Basis for Planning*, Washington DC: The World Bank, 1988.
- Lewis, B. and E. Thorbecke.** "District-Level Economic Linkages in Kenya: Evidence Based on a Small Region Social Accounting Matrix." *World Development*, 1992, 20, hal. 881-897.
- Lipsey, E. Richard.** "Role of Foreign Direct Investment in International Capital Flows." National Bureau of Economic Research Working Paper No. 7094, 1999.
- Portes, Richard and Rey, Hélène.** "The Determinants of Cross-Border Equity Flow." National Bureau of Economic Research Working Paper No. 7336, 1999.
- Pyatt, G and J.I. Round.** "Accounting and Fixed-Price Multipliers in a Social Accounting Matrix Framework" dalam G. Pyatt and J.I. Round (eds.), *Social Accounting Matrices: A Basis for Planning*. Washington DC: The World Bank, 1988.
- Pyatt, G and J.I. Round.** "Social Accounting Matrix for Development Planning" dalam G. Pyatt and J.I. Round (eds.), *Social Accounting Matrices: A Basis for Planning*. Washington, DC: The World Bank, 1988.
- Pyatt, G.** "A SAM Approach to Modelling." *Journal of Policy Modelling*, 1988, 10(3), hal. 327-335.
- Suratman, Eddy.** *Analisis Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Terhadap Kinerja Perekonomian Kalimantan Barat: Suatu Studi Dengan Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi*, Disertasi Doktor FEUI, 2004, Tidak dipublikasikan.
- Thorbecke, E.** "The Social Accounting Matrix and Consistency-Type" dalam G. Pyatt and J.I. Round (eds.), *Social Accounting Matrices: A Basis for Planning*. Washington DC: The World Bank, 1988.
- Thorbecke, E.** "Social Accounting Matrices and Social Accounting Analysis" dalam Walter Isard (ed.), *Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science*. 1997.